

ABSTRAK

EVI SELVIANI, Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Dalam Pemungutan Pajak Rumah Kos di Kota Bandung

Kota Bandung merupakan Ibu Kota Provinsi Jawa Barat, dimana hal tersebut berdampak kepada banyaknya Perguruan Tinggi Negeri Maupun Swasta. Hal itu menjadikan banyaknya mahasiswa dari luar Kota Bandung yang pindah dan menetap di Kota Bandung, selain itu unit usaha industri juga berkembang dengan pesat di Kota Bandung, yang menjadikan banyaknya pekerja yang dari luar Kota Bandung akhirnya menetap di Kota Bandung. Selain itu, pusat perdagangan modern maupun tradisional di Kota Bandung juga semakin meningkat. Alasan-alasan tersebutlah yang menjadikan banyaknya usaha Rumah Kos di Kota Bandung.

Pajak rumah kos termasuk kedalam Pajak Daerah karena menjadi salah satu objek dari Pajak Hotel. Di Kota Bandung, sesuai dengan amanat dari Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung yang berwenang atas segala kepentingan yang berkaitan dengan Pajak Rumah Kos adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah. Pajak Rumah Kos sendiri menerapkan *system Self Assessment* yang mewajibkan wajib pajaknya untuk bersifat aktif dalam menghitung dan melaporkan pajak terutanganya, sedangkan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah bersifat pasif.

Penelitian ini mempunyai kesimpulan permasalahan mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah terkait pajak rumah kos dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah terkait Pajak Rumah Kos di Kota Bandung. Dan teori yang digunakan adalah teori negara hukum, otonomi daerah dan teori kewenangan.

Metode penelitan yang dipakai adalah deskriptif analitis, metode penelitian yang bertujuan memberikan suatu gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diteliti untuk kemudian di analisis dengan pendekatan yuridis Normatif-Empiris yang bertempat di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Bersumber pada hasil riset yang dimiliki, hasil penelitian tesis ini adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung kurang efektif dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Lembaga yang berwenang atas segala hal yang menjadi objek pajak daerah, yang salahsatunya adalah pajak rumah kos. Terdapat 2 hal yang menjadikan faktor-faktor tersebut terjadi, pertama dari aspek dasar hukumnya yang memang kurang detail mengatur mengenai pajak rumah kos dan juga dari aspek sumber daya manusianya, SDM Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah sebagai Lembaga yang berwenang dan juga dari wajib pajak itu sendiri, yang berkaitan dengan kesadaran, pemahaman, dan juga kepatuhannya sebagai wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya untuk melaporkan, menghitung dan membayar pajak terutanganya sendiri.

Kata Kunci : Tugas dan Fungsi, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Pajak Rumah Kos

ABSTRACT

EVI SELVIANI, Implementation of Duties and Function Of the Regional Revenue Management Agency in Collection of Boarding House Taxes in the city of Bandung.

The city of Bandung is Capital City of West Jawa Province, were this has an impact on the number of public and private universities. This caused many students from outside the city of Bandung to move and settle in the city of Bandung, beside that industrial business units were also growing rapidly in the city of Bandung, wich made many workers from outside the city of Bandung finally settle in the city of Bandung. In addition, modern and tradisional trade centers in the city of Bandung are also increasing. It is these reasons that make many boarding house businesses in the city of Bandung.

Boarding house tax is included in the regional tax because it is one of the objects of hotel tax. In the city of bandung, according to the mandate of the regional regulation of the city of Bandung Number 08 of 2016 concerning the formation and composition of regional apparatuses of the city of bandung, the authority for all interests related to boarding house taxes is the regional revenue management agency. Boarding house tax it self implements a self assessment system which requires taxpayers to be active in calculating and reporting their payable taxes, while the regional revenue management agency passive.

This research has concluded the problem regarding the implementation of the duties and functions of the regional revenue management agency related to boarding house taxes and the factors that may affect the implementation of the duties and functions of the regional revenue management agency related to boarding house tax in the city of Bandung.

This study uses an analytical description research method, a research method that aims to provide a systematic, factual and accurate description of the fats and relationships between the phenomena studied for later analysis using a normative-empirical juridical approach hpused at the bandung regional revenue management agency.

Based on the research results at hand, the results of this thesis research are that the regional revenue management agency for the city of bandung is less effective in carrying out its duties and functions as an institution that is in charge of all matters that are the object of regional taxes, one of which is the boarding house tax. As for the factors that make this happen, the researcher concludes that there are 2 thins, from the basic aspect of the law which lacks detailed regulations regarding boarding house taxes and also from the aspect of human resources, the HR of the regional revenue management agency as an authorized instituon and also from the obligation to the tax itself, which relates to awareness, understanding, and also compliance as a taxpayer to complete his obligation to report, calculate and pay his own tax payable.

Keywords: Duties and Functions, Regional Revenue Management Agency, Boarding House Tax